

REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL MENJADI LAPORAN KEUANGAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PPh BADAN TERHUTANG PADA PT FAJAR SELATAN PALEMBANG

Gracia Stephani Lauwrensius (gracia.stephani@yahoo.co.id)

Siti Khairani, M. Ridhwan

Jurusan Akuntansi

STIE MDP

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal pada PT Fajar Selatan Palembang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil perhitungan rekonsiliasi (koreksi) fiskal terhadap Laporan Keuangan perusahaan berupa Laporan Laba/ Rugi dan menghitung besarnya laba kena pajak serta menentukan pajak penghasilan pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba untuk tujuan perpajakan. Laba komersial untuk tahun 2011 sebesar Rp 705.218.989, sedangkan laba fiskal sebesar Rp 769.709.997 dan pajak penghasilan terutang pada PT Fajar Selatan Palembang sebesar Rp 142.789.000

Kata kunci : Rekonsiliasi, Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan

Abstract : Determine the amount of income tax due by the company to reconciliation the financial statements to be fiscal financial statement of PT Fajar Selatan Palembang was the purpose of this research. This research used the qualitative research to describe the results of calculation of reconciliation (correction) of the company's financial statement fiscally a income statement and calculate the amount of taxable income as well as determine the income tax in 2011. The results of this research indicate the existence of differences between accounting profit and profit according to for the purpose of taxation. Commercial profit for 2011 Rp 705.218.989 and Rp 769.709.997 fiscal profit and tax due PT Fajar selatan palembang to Rp 142.789.000.

Key words : Reconciliation, Fiscal Correction, Corporate Tax

1 PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan bangsa membiayai pembangunan sendiri. Bagi negara Indonesia sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak salah satunya pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah subjek pajak badan.

Dalam Undang – Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha (badan) wajib menyelenggarakan pembukuan berupa laporan Keuangan.

Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan tentang informasi keuangan serta hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan perusahaan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimana terdapat perbedaan antara penghasilan dan biaya – biaya yang diperkenankan atau tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan.

Penyesuaian ini membuat perusahaan melakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan agar laporan keuangan komersial sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat diterima sebagai laporan keuangan perpajakan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul “**Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal untuk Menghitung PPh Badan Terhutang pada PT Fajar Selatan Palembang**”.

2 LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2011,h.1). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Prof Dr. MJH. Smeets dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2010,h.4). Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.2 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung: pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif: pajak pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak

provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan menurut Resmi (2011,h.74). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang No 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 1991, Undang-Undang No 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.2.2 Subjek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 dan 3.

2.2.3 Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Objek pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan. Objek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4.

2.2.4 Tarif Pajak

Sesuai Pasal 17 ayat (1) tarif pajak penghasilan (PPh) badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu sebesar 28% (dua puluh delapan persen) untuk tahun pajak 2009 dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2011,h.81) Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang – undang tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

2.3.2 Hubungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan masing-masing dalam menentukan penghasilan dan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai

kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ada dua cara untuk menyusun laporan keuangan fiskal. Pertama, pendekatan terpisah (*separated approach*) dimana wajib pajak membukukan segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terutang dan berdasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial. Pendekatan kedua, *extra-compatible approach* dimana wajib pajak membukukan semua transaksi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terutang. Jadi laporan keuangan komersial terkait dengan laporan keuangan fiskal karena laporan keuangan komersial digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal.

2.4 Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal

2.4.1 Definisi Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal

Menurut Agoes dan Estranita Trisnawati (2010,h.218) Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2009,h.59) Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

2.4.2 Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Negatif

Jenis koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

a. Koreksi Positif

Menurut Wahono (2012,h.106) Koreksi fiskal positif bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang.

Menurut Agoes dan Estranita Trisnawati (2010,h.219) Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya komersial, yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak terutang. (Wahono 2012,h.106).

Menurut Agoes dan Estranita Trisnawati (2010,h.219) Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditanggguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2007,h.11) pendekatan penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel atau lebih.

Dari definisi di atas pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang perusahaan serta laporan keuangan berupa laporan laba rugi.

3.2 Objek/ Subjek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah PT Fajar Selatan Palembang yang beralamat di JL Pasar 16 Ilir 161 C, Ilir Timur 1 Palembang. Subjek penelitian dalam penelitian ini berupa data Laporan Keuangan perusahaan yaitu Laporan Laba Rugi.

3.3 Jenis Data

Menurut Sekaran (2009,h.77), jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada. Yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

- a. Gambaran umum PT Fajar Selatan Palembang, yang terdiri dari:

1. Sejarah Perusahaan
2. Struktur Organisasi
3. Pembagian Tugas
4. Aktivitas Perusahaan

- b. Laporan Keuangan PT Fajar Selatan Palembang, berupa Laporan Laba/ Rugi tahun 2011.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan melakukan dokumentasi serta observasi.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dibagi menjadi dua yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.

- a. Analisis Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2007,h.13) Analisis data kuantitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

- b. Analisis Kualitatif

Menurut Hasan (2002,h.98) Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana peneliti akan melakukan dan mendeskripsikan hasil perhitungan rekonsiliasi (koreksi) fiskal terhadap Laporan Keuangan perusahaan berupa Laporan Laba/ Rugi serta menghitung besarnya laba kena pajak dan menentukan jumlah pajak penghasilan pada tahun 2011.

4 PEMBAHASAN

Dari data perusahaan berupa laporan keuangan komersial yaitu laporan laba/ rugi perusahaan, maka penulis melakukan rekonsiliasi (koreksi) atas laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal untuk menentukan laba kena pajak yang berguna untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPH) badan.

4.1 Rekonsiliasi (koreksi) Fiskal Laporan Keuangan

Terdapat perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya. Oleh karena itu perlu diadakan suatu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal laporan keuangan PT Fajar Selatan tahun 2011:

PT FAJAR SELATAN
REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL KE LABA RUGI FISKAL
Untuk Periode 31 Desember 2011

Keterangan	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan				
Penjualan Barang Dagangan	9.303.698.248	-	-	9.303.698.248
Potongan Penjualan	-	-	-	-
Jumlah Penjualan	9.303.698.248	-	-	9.303.698.248
Harga Pokok Penjualan				
Buang Dagang Awal	3.246.552.118	-	-	3.246.552.118
Pembelian Barang Dagang	5.478.914.664	-	-	5.478.914.664
Jumlah	8.725.466.782	-	-	8.725.466.782
Buang Dagang Akhir	1.570.257.467	-	-	1.570.257.467
Jumlah Harga Pokok Penjualan	7.155.209.315	-	-	7.155.209.315
Laba Kotor	2.148.488.933	-	-	2.148.488.933
Beban Usaha				
Gaji dan Upah Karyawan	813.706.000	-	-	813.706.000
Transportasi Karyawan	87.225.000	-	-	87.225.000
Beban Penghutan	70.336.000	70.336.000 ^(A)	-	-
Beban Angkat Ekspedisi	30.317.250	-	-	30.317.250
Beban Perjalanan Dinas	75.560.000	38.750.000 ^(B)	-	36.810.000
Beban Pemakaian	13.528.000	-	-	13.528.000
Beban Listrik	15.069.625	4.225.719 ^(C)	-	10.843.907
Beban Telepon dan Fax	5.789.280	1.125.600 ^(D)	-	4.663.680
Beban PAM	3.756.777	1.058.200 ^(E)	-	2.698.577
Beban Fotocopy & Perawatan	4.332.300	-	-	4.332.300
Beban Sewaan Perlengkapan Kantor	4.265.250	-	-	4.265.250
Beban Retribusi Keamanan & Keamanan	5.000.000	-	-	5.000.000
Beban Adm & K/LI	5.000.000	-	-	5.000.000
Beban Pemeliharaan & BBM Kendaraan	39.213.500	6.368.750 ^(F)	-	32.844.750
PPH dan Bea Materai	4.325.227	-	-	4.325.227
Pajak	31.166.100	31.166.100 ^(G)	-	-
Beban Entertainment	55.000.000	55.000.000 ^(H)	-	-
Beban Penyusutan Aset	240.210.710	-	76.766.915 ^(I)	322.993.625
Sumbangan	4.500.000	4.500.000 ^(J)	-	-
Jumlah Beban Usaha	1.464.562.399	162.556.378	76.766.915	1.378.778.936
Laba Usaha	683.926.534	162.556.378	76.766.915	769.799.997
Penghasilan di Luar Usaha				
Pendapatan Bunga	2.752.455	-	2.752.455 ^(K)	-
Penghasilan Sewa Bangunan	18.540.000	-	18.540.000 ^(L)	-
Jumlah Penghasilan di Luar Usaha	21.292.455	-	21.292.455	-
Laba Bersih Usaha	705.218.989	162.556.378	98.059.370	765.799.997

Sumber: PT Fajar Selatan (data diolah)

a. Beban Pengobatan

Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e, biaya pengobatan merupakan imbalan yang diberikan perusahaan dalam bentuk kenikmatan sehingga harus dikoreksi.

b. Beban Perjalanan

Beban perjalanan dikoreksi positif sebesar Rp.38.750.000 karena dalam beban perjalanan terdapat biaya

perjalanan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b, biaya untuk perjalanan untuk kepentingan pribadi tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

c. Beban Listrik

Dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 4.225.728 karena merupakan suatu bentuk kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada salah satu karyawan (direktur). Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 9 ayat (1) huruf e, penggantian/ imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

d. Beban Telepon dan Fax

Beban telepon dan fax dikoreksi sebesar Rp. 1.125.600 karena terdapat biaya telepon rumah pemilik perusahaan. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, penggantian/ imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

e. Beban PAM

Terdapat biaya PAM rumah pemilik perusahaan sebesar Rp.1.058.200 sehingga harus dikoreksi positif sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf e, penggantian imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

f. Beban Pemeliharaan & BBM Kendaraan

Dikoreksi sebesar Rp. 6.368.750 karena terdapat biaya BBM kendaraan untuk pemilik perusahaan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang perlakuan biaya kendaraan perusahaan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%.

g. Pajak

Dikoreksi sebesar Rp 31.166.100 karena pajak yang dibayarkan oleh perusahaan berupa angsuran PPh Pasal 25. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh, Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

h. Beban Entertainment

Sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, syarat biaya entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan apabila terdapat bukti-bukti yang mendukung pengeluaran tersebut. Sedangkan perusahaan tidak memiliki bukti/ perincian atas pengeluaran biaya entertainment sehingga harus di koreksi sepenuhnya.

i. Penyusutan Aset Tetap

Dikoreksi negatif sebesar Rp. 76.766.915 (penyusutan menurut komersial sebesar Rp 246.226.710 dengan penyusutan menurut fiskal sebesar Rp 322.993.625) karena adanya perbedaan umur ekonomis yang digunakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

j. Sumbangan

Dikoreksi sepenuhnya karena sumbangan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g.

k. Penghasilan Bunga

Bedasarkan Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) huruf a, bunga deposito dikoreksi negatif sebesar Rp. 2.752.455 karena bunga deposito/tabungan termasuk PPh Final. Penghasilan yang dikenakan PPh final dikoreksi negatif karena bunga deposito tersebut telah dikenakan PPh pada saat bunga deposito/tabungan tersebut diterima.

l. Penghasilan Sewa Bangunan

Sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) huruf d,

penghasilan sewa dikoreksi negatif sebesar Rp. 18.540.000 karena pendapatan sewa gedung termasuk PPh Final. Penghasilan yang dikenakan PPh final dikoreksi negatif karena pendapatan sewa gedung tersebut telah dikenakan PPh pada saat pendapatan sewa tersebut diterima.

4.1.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Dari pembahasan di atas, maka Pajak Penghasilan Badan berdasarkan laba komersial yang telah di koreksi fiskal adalah sebagai berikut:

A. PPh Terutang

Dari laba kena pajak, maka dapat dihitung Pajak Penghasilan Badan Terutang PT Fajar Selatan tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku sebagai berikut:

- a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
= (Rp4.800.000.000 : Peredaran Bruto) x Penghasilan Kena Pajak
= (Rp 4.800.000.000 : Rp 9.303.698.248) x Rp 769.709.997
= Rp 397.111.760
- b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
= Penghasilan Kena Pajak – Peredaran Bruto yang memperoleh fasilitas
= Rp 769.709.997 – Rp 397.111.760
= Rp 372.598.237

PPh Terutang:

$$\begin{aligned} &= \{(50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 397.111.760\} + \\ &\quad \{25\% \times \text{Rp } 372.598.237\} \\ &= \text{Rp } 49.638.970 + \text{Rp } 93.149.559,25 \\ &= \text{Rp } 142.788.529,3 \end{aligned}$$

PPh terutang tahun 2011 (pembulatan)
=Rp 142.789.000

B. PPh Kurang atau Lebih Bayar

PPh terutang	Rp 142.789.000
PPh pasal 22 tahun 2011	(Rp 109.928.268)
PPh pasal 25 tahun 2011	(Rp 31.166.100)
PPh kurang bayar	Rp 1.694.632

C. Angsuran PPh Pasal 25

Pajak terutang	Rp 142.789.000
PPh dipotong pihak lain	(Rp 109.928.268)
Dasar perhitungan angsuran	Rp 32.860.732

Angsuran PPh Pasal 25 bulanan tahun 2012:

- = Rp 32.860.732 : 12
- = Rp 2.738.394,333
- = Rp 2.738.000 (pembulatan)

Dari perhitungan yang telah dilakukan pada Tabel 4.3, maka dapat dilihat terjadi koreksi fiskal positif sebesar Rp 64.491.008 yang mengakibatkan laba fiskal sebesar Rp 769.709.997 sedangkan laba komersial sebesar Rp 705.218. Dengan rekonsiliasi (koreksi) fiskal ini dapat diketahui PPh terutang PT Fajar Selatan tahun 2011 sebesar Rp 142.789.000, serta besarnya PPh kurang bayar sebesar Rp 1.694.632 dan angsuran pasal 25 yang dibayar perusahaan setiap bulan pada tahun 2012 sebesar Rp 2.738.000.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal berbeda, hal ini disebabkan karena terdapat biaya/ penghasilan yang tidak di perkenankan dalam perpajakan. Perbedaan biaya/ penghasilan tersebut menyebabkan koreksi fiskal positif dimana jumlah laba pada PT Fajar Selatan menurut komersial sebesar Rp 705.218.989, sedangkan laba menurut fiskal (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp 769.709.997, yang berarti fiskal bertambah sebesar Rp 64.491.008. Setelah dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal, maka PPh terutang badan pada PT Fajar Selatan sebesar Rp 142.788.529,3 (dibulatkan menjadi Rp 142.789.000) dengan angsuran PPh yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan pada tahun 2012

sebesar Rp 2.738.394,333 (dibulatkan menjadi Rp 2.738.000).

5.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi PT Fajar Selatan bagi PT Fajar Selatan hendaknya lebih memahami dan mengikuti setiap pembaharuan/ perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama mengenai tarif pajak penghasilan serta penghasilan/ biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam penyusunan laporan keuangan selain didasarkan pada Standar Akuntansi, sebaiknya perusahaan juga menyesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Agoes, Sukrino dan Estranita Trisnawati 2010, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Hasan, M. Iqbal 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andi, Yogyakarta.

Resmi, Siti 2011, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly 2011, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan 10, CV Alfabeta, Bandung.

_____, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan 12, CV Alfabeta, Bandung.

Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, *Tentang Pajak Penghasilan*.